



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

2024

**BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL PROVINSI RIAU**

*Dari Riau menuju Indonesia Bersinar*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan jajaran BNN Kab/Kota tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan BNN selaku Penyelenggara Negara di bidang P4GN, wajib menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja BNNP Riau dan Jajaran BNN Kab/Kota Tahun 2024 yang meliputi kinerja dengan 13 (Tiga Belas) Sasaran Strategis dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, BNN sebagai lembaga pemerintah non Kementerian yang telah menggunakan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Kinerja Instansi Pemerintah ke BNN RI dan diteruskan kepada Presiden RI serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN Provinsi Riau. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam upaya meningkatkan kinerja BNNP Riau telah melaksanakan pelayanan yang prima dan cepat sebagai agenda Reformasi Birokrasi, juga dalam rangka

meningkatkan akuntabilitas kinerja, BNNP Riau dan Jaringan BNN Kab/Kota Tahun 2024 telah berhasil menyelesaikan berbagai kegiatan P4GN.

Laporan ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang, Akhirnya saya berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNNP Riau Tahun Anggaran 2024 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja BNNP Riau secara keseluruhan.

Menyadari hal tersebut, mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNNP Riau dapat disusun lebih baik dan memenuhi harapan semua pihak.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNNP Riau ini dibuat, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita semua. Amin.

Pekanbaru, 20 Januari 2024  
Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Riau



**Robinson D.P. Siregar, S.H., S.I.K, M.H.**

**EXECUTIVE SUMMARY**  
**LAPORAN KINERJA BNNP RIAU**  
**TAHUN 2024**

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau telah memperoleh target dan sasaran kinerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keberhasilan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika secara efektif di Provinsi Riau merupakan wujud capaian Fungsi Pencegahan, Fungsi Pemberdayaan Masyarakat, Fungsi Rehabilitasi, Bidang Pemberantasan dan Intelijen serta Bagian Umum. Gambaran capaian sasaran strategis BNNP Riau adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan 2 (Dua) Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut:
  - a. Jumlah Kabupaten Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori tinggi di wilayah provinsi target 4 Kab/Kota, capaian 3 Kab/Kota (75%);
  - b. Jumlah Kabupaten Kota dengan Indeks ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori tinggi di wilayah provinsi target 4 Kab / Kota, capaian 4 Kab/Kota (100%).
2. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut:
  - a. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah Provinsi target 4 Kab / Kota, Capaian 4 Kab / Kota (100%);
  - b. Jumlah Kawasan Rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari Bahaya menjadi Waspada, target 1 Kawasan capaian 1 Kawasan (100%) dengan realisasi melebihi ekspektasi, turun dari Bahaya menjadi Siaga;
  - c. Nilai Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan yang di intervensi, target 2,00 capaian 2,51 (125,5%).
3. Fungsi Rehabilitasi dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut:

- a. Persentase penyalahguna dan atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan target 68% dan capaian 90,32% (132,8%)
  - b. Jumlah Petugas penyelenggaraan IBM yang terlatih, target 10 Orang capaian 10 Orang (100%)
  - c. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi, target 1 lembaga Capaian 1 Lembaga (1300%)
  - d. Jumlah Unit penyelenggara Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi target 10 Unit IBM capaian 10 Unit IBM (100%)
  - e. Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Riau target 3,42 capaian 3,79 (110,8%)
4. Bidang Pemberantasan dan Intelijen dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut:
- a. Jumlah berkas tindak pidana peredaran gelap Narkoba yang Selesai (P21) target 12 berkas tercapai 38 Berkas (316%) yang P21;
  - b. Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan target 100 tercapai 100 (100%);
  - c. Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba target 100 tercapai 100 (100%).
5. Bagian Umum dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut:
- a. Nilai kinerja anggaran BNN target 87 tercapai 98,97 (113,7%)
  - b. Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target 4 Kab/Kota , capaian 4 Kab / Kota (100%);
  - c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Riau target 97,56 capaian 97,96 (100,4%);
  - d. Jumlah BNN Kabupaten Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target 4 Kab/Kota capaian 3 Kab/Kota (75%).
  - e. Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian TPI target 75 capaian 75,84 (101,12%)

Dari 18 (Delapan belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BNNP Riau Tahun 2024, 16 (Delapan belas) indikator kinerja tercapai sedangkan sisanya sebanyak 2 (Dua) indikator kinerja tidak tercapai.

Pagu anggaran BNNP Riau dan jajaran BNN Kab/Kota tahun 2024 mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 17.314.330.000,-** (Tujuh belas miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 16.831.841.093,-** (Enam belas miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu Sembilan puluh tiga rupiah) atau dengan persentase penyerapan sebesar **97,2%**.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permasalahan Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan permasalahan kejahatan besar (*extraordinary crime*) yang terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas Negara. Hal ini menjadi tanggung jawab seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Untuk itu dalam rangka mengintensifkan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 35 tentang Narkotika.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 diatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Program Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) menjadi tugas utama BNN. Dalam rangka mewujudkan program P4GN, BNN menyebar sampai tingkat wilayah provinsi bahkan kabupaten/kota di Indonesia.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah provinsi. BNNP Riau merupakan instansi vertikal BNN yang bertugas di wilayah provinsi Riau. Dahulu BNNP Riau, merupakan instansi pemerintah daerah provinsi Riau dengan nama Badan Narkotika Provinsi (BNP) Riau. Namun sejak tahun 2011, melalui kesepakatan bersama antara pihak BNN dengan Pemerintah Provinsi Riau, BNP Riau berubah menjadi lembaga vertikal dengan nama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau.

Strategi yang dilakukan oleh BNNP Riau dalam upaya perlawanan terhadap kejahatan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, serta Pemberantasan. Pencegahan melalui Diseminasi Informasi dan Advokasi, Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemberdayaan Alternatif dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat, Rehabilitasi melalui Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Komponen Masyarakat dan Pelaksanaan Pascarehabilitasi, Pemberantasan melalui pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika,

Pelaksanaan Interdiksi wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Darat, serta Laporan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2024, BNNP Riau sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), berkewajiban melaporkan kinerja kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui BNN RI. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNP. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden No. 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) 2020 - 2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
8. Capaian Kinerja Wilayah BNN Provinsi Riau T.A 2024.

## **C. Visi Misi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

### **1. Visi**

Menjadi Lembaga yang professional, Tangguh dan terpercaya dalam pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di wilayah Provinsi Riau

### **2. Misi**

- a. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan;
- b. Mengoptimisasikan Sumberdaya dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- c. Melaksanakan Pencegahan penyalahgunaan Narkotika secara komprehensif;
- d. Memberantas peredaran gelap Narkotika secara Profesional.

### **3. Kedudukan**

BNN merupakan lembaga vertikal yang memiliki perwakilan di provinsi yang disebut Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau yang merupakan perwakilan BNN yang berlokasi di Jl. Pepaya no. 65, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. BNNP Riau resmi menjadi lembaga vertikal sejak Tahun 2011.

### **4. Tugas**

- a. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- e. Melakukan kerja sama antara instansi pemerintah daerah, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Membuat laporan tahunan mengenai capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

## 5. Fungsi

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, dan Pemberantasan;
- b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK/Kota);
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNP;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNP;
- f. Pelayanan administrasi BNNP.

## D. Struktur Organisasi

BNNP Riau terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Bagian Umum
- c. Bidang Pemberantasan dan Intelijen
- d. Seksi Intelijen
- e. Seksi Wastahti

Adapun stuktur organisasi BNNP Riau, yakni :

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>1. Kepala BNNP Riau</b>            | <b>: BJP Robinson D.P. Siregar.,S.H,S.I.K</b> |
| <b>2. Kepala Bagian Umum</b>          | <b>: Febri Firmanto, S.H., M.Si.</b>          |
| <b>3. Kepala Bidang Pemberantasan</b> | <b>: KBP C.P Sinaga, S.H., M.H</b>            |
| ▪ Kasie. Intelijen                    | : Rhama, S.H.                                 |
| ▪ Kasie. Wastahti                     | : Mira Benita Maharama, SH                    |

## **E. Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di bidang P4GN ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I     Pendahuluan

Bab II    Perencanaan Kinerja

Bab III   Akuntabilitas Kinerja

Bab IV    Penutup

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis/ Rencana Program Kerja**

Renstra BNN Tahun 2020-2024 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (selanjutnya disebut P4GN) yang akan dilaksanakan oleh BNN dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan.

**Visi :** “Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

**Misi :**

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan penyalahgunaan Narkotika secara Profesional;
2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika;
3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas kelembagaan.

**Tujuan :**

- 1) Melindungi dan menyelematkan masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba;
- 2) Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas.

BNN Provinsi Riau sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang P4GN, yang bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Tujuan tersebut telah ditetapkan dalam sasaran strategis pada Rencana Strategis (Renstra) BNN tahun 2020-2024.

Renstra BNN tahun 2020-2024 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan BNN baik BNNP maupun BNNK/Kota.

Renstra BNN tahun 2020-2024 dituangkan dalam Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Provinsi Riau Tahun 2020-2024. Adapun Matrik Rencana Program Kerja BNN Provinsi Riau Tahun 2020-2024 tertuang dalam tabel berikut:

**Matrik Rencana Program Kerja  
Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau  
Tahun 2020-2024**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	-	2	2	4	4
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	-	3	3	4	4
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	-	4	4	4	4
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1	1	1	1	1
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	-	2,7	2,75	2,8	2,85

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	-	25	25	30	35
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	-	10	10	15	20
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	-	5	5	5	6
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	-	5	6	6	7
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	-	3,2	3,25	3,3	3,35
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	1	1	1	2	3
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	10	10	10	15	20

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		tanaman terlarang lainnya	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	-	-	-	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100	100	100
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	100	100	100	100
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	-	-	-	-	1
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	88	89	89	90	90
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	-	-	-	-	1
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	-	94	94	94	94
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	-	4	4	4	4

## B. Rencana Kinerja Tahunan

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi Riau Tahun 2024 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi Riau tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Provinsi Riau selama satu tahun.

Rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Riau tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan skala prioritas permasalahan narkoba di wilayah dan kondisi dukungan dan kapasitas sumber daya pada masing-masing BNNP dan BNN Kab/Kota jajaran. Rumusan rencana kinerja dan pendanaan BNNP dan BNN Kab/Kota jajaran telah memperhatikan struktur kebijakan, struktur organisasi, struktur anggaran, dan struktur kinerja secara berjenjang hingga tingkat jabatan terendah.

Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Riau dan BNN Kab/Kota jajaran tahun 2024 sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>KEBUTUHAN PENDANAAN</b>
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/Kota	449.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kabupaten/Kota	544.700.000
3.	Pemberdayaan	Meningkatnya kesadaran dan	Jumlah kabupaten/kot	4 Kabupaten	1.006.882.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
	Peran Serta Masyarakat	kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	a dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	/Kota	
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	88.800.000
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	2	
5.	Pascarehabilitasi Penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	54.665.000
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	81.275.000
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	1 Lembaga	821.422.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional	10 Unit	
			Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,42	
8.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	0 Jaringan	175.000.000
9.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	8 Berkas Perkara	450.000.000
10	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	170.065.000
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
11	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	-	-
12	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	87	81.682.000
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	1 BNN Kabupaten /Kota	
13	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	97,56	13.749.749.000
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 BNN Kabupaten /Kota	
			Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	75	

### C. Perjanjian Kinerja

Renstra BNN tahun 2020-2024 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan BNN baik BNNP maupun BNNK/Kota. Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN tahun 2024 dituang dalam Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2024.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab kinerja. Perjanjian Kinerja berisikan sasaran strategis (outcome), indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/ instansi yang bersangkutan. Begitu juga dengan BNN Provinsi Riau ada perjanjian antara pimpinan satker yakni Kepala BNN Provinsi Riau dengan pimpinan tertinggi BNN yakni Kepala BNN.

Adapun Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Riau Tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini :

### Perjanjian Kinerja BNN Tahun 2024

**Kementerian/Lembaga : Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau**

**Tahun Anggaran : 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	4 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	4 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi	4 Kabupaten/Kota

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan
5		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,00
6	Meningkatnya Upaya pemulihan penyalahguna dan / atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan / pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	1 Lembaga
9		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	10 Lembaga
10	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,42
11	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	12 Berkas

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
12	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100
13		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100
14	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Riau	87 Indeks
15		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	4 BNN Kabupaten/ Kota
16	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Riau	97,56 Indeks
17		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 BNN Kabupaten/ Kota
18	Meningkatnya pengelolaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Vertikal	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan Penilaian Internal	75

Selama tahun berjalan, pelaksanaan penetapan kinerja ini akan dilakukan evaluasi dan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi. Hasil dari evaluasi dan pengukuran tersebut dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Penetapan Kinerja BNNP Riau Tahun 2024 menetapkan 13 (Tiga Belas) sasaran kegiatan dengan indikator kinerja utama sebanyak 18 (Delapan belas) indikator. Dari 18 (Delapan belas) indikator kinerja utama tersebut dapat, 16 (Enam Belas) indikator tercapai, sementara 2 (Dua) indikator lainnya tidak tercapai. Disamping itu, BNNP Riau juga melakukan berbagai kegiatan pendukung dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian 13 (Tiga belas) sasaran kegiatan yang akan dicapai, dengan indikator kinerja utama sebanyak 18 (Delapan belas) indikator yang diuraikan sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten Kota dengan Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkotika berkategori tinggi di wilayah provinsi	4 Kab/Kota	3 Kab/Kota	75%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten Kota dengan Indeks ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkotika berkategori tinggi di wilayah provinsi	4 Kab/Kota	4 Kab / Kota	100%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah Provinsi	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	100%
4	Meningkatnya upaya pemulihan Kawasan atau wilayah rawan narkotika secara berkelanjutan	Jumlah Kawasan Rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari Bahaya menjadi Waspada	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
5		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang di intervensi	2,00	2,51	125,5%

6	Meningkatnya Upaya pemulihan penyalahguna dan atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	90,32%	132,8%
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah Petugas penyelenggaraan IBM yang terlatih	10 Org	10 Org	100%
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
9		Jumlah Unit penyelenggara Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	10 Unit	10 Unit	100%
10	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Provinsi Riau	3,42	3,79	110,8%
11	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara kasus tindak pidana narkotika P21	12 Berkas	38 Berkas	316%
12	Meningkatnya pengawasan tahan dan Barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100%
13		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	100	100	100%
14	Meningkatnya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran BNNP Riau	87	98,97	113,75%
15		Jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	4 BNN Kabupaten / Kota	4 BNN Kab/Kota	100%
16	Meningkatnya tata Kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Riau	97,56	97,96	100,4 %
17		Jumlah BNN Kabupaten Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 Kabupaten / Kota	3 Kabupaten / Kota	75%
18	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks	75,84	101,12%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNNP Riau selama kurun waktu tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel. Capaian kinerja tahun 2024 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNNP Riau.

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba</b>
-------------------------	---

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja utama yang diuraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kab/Kota	3 Kab / Kota	75%

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi adalah jumlah kabupaten/kota yang penduduk usia remajanya memiliki kemampuan individu untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba.

Metode pengukuran jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dengan kriteria yaitu :

- a. menghitung jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi;
- b. kriteria indeks ketahanan diri remaja berkategori "Tinggi" dengan melakukan pengujian dan pengukuran menggunakan Alat Ukur Ketahanan Diri Anti Narkoba (Anti Drugs Scale/ADS) dengan skala pengukuran yaitu :
  - b.1 **Self Regulation** : kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi dan pengaruh lingkungan terhadap diri;

b.2 **Assertiveness** : kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas;

b.3 **Reaching Out** : kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

- c. klasifikasi indeks rata-rata ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan dengan tabel sebagai berikut :

<b>Klasifikasi</b>	<b>Interval Ketahanan Diri (anti) Narkoba</b>
Sangat rendah	$\leq 45.97$
Rendah	45.98 – 49.73
Tinggi	49.74 – 53.50
Sangat tinggi	$\geq 53.51$

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 4 kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” dapat terealisasi sebanyak 3 kabupaten/kota atau sebesar 75%

<b>No</b>	<b>Satker</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>Kualifikasi</b>
1	BNN Provinsi Riau	54,17	54,78	54,17	53,28	Tinggi
2	BNN Kota Pekanbaru	53,53	54,87	55,54	50,28	Tinggi
3	BNN Kabupaten Kuantan Singingi	55,36	57,14	55,36	55,26	Sangat Tinggi
4	BNN Kabupaten Pelalawan	53,93	54,19	53,93	54,26	Sangat Tinggi
5	BNN Kota Dumai	52,37	55,42	52,7	49,67	Rendah

Dari capaian yang didapat oleh BNN Provinsi Riau, terdapat penurunan kinerja yang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana BNNP Riau, BNNK Kuantan Singingi dan BNN Kota Pekanbaru dan BNN Kab Dumai tidak dapat memenuhi nilai Dekteri yang sudah di putuskan sesuai dengan Perjanjian Kinerja T.A 2024 dengan Deputi Bidang Pencegahan BNN RI. Untuk BNNP Riau, BNN Kota Pekanbaru dan BNN Kab Kuansing meskipun nilai Dekteri tidak mencapai target dari Perjanjian Kinerja T.A 2024, namun kualifikasi dari nilai Dekteri yang di dapat masih sesuai dengan target yaitu berkualifikasi “Tinggi”. Sedangkan untuk Satker BNN Kota Dumai, nilai Dekteri kualifikasi nilainya tidak memenuhi target sesuai dengan Penetapan Kinerja T.A 2024. Faktor penyebab kegagalan adalah sebagai berikut:

1. Petugas tidak memahami kriteria dan komponen penilaian, sehingga hanya fokus pada ADS, nilai pada Tinggi, tapi penilaian indeks final nya menurun;
2. Kurangnya SDM pelaksana kegiatan Pencegahan khususnya di BNN Provinsi Riau dan Jajaran BNN Kab/Kota nya. BNN Kota Dumai untuk pelaksanaan seluruh kegiatan Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat hanya diawaki oleh 2 (dua) orang personil;
3. Pelaksanaan softskill di lokasi Desa Bersinar yang berada di luar kota membutuhkan persiapan dukungan anggaran yang memadai, apalagi dengan adanya kebijakan blokir anggaran perjalanan dinas di Triwulan IV 2024 oleh Pemerintah;
4. Kurang variatifnya program pencegahan yang dilaksanakan pada program kerja BNNP Riau dan BNNK Jajaran, karena kekurangan anggaran dan adanya kebijakan Automatic Adjustment dan blokir perjalanan dinas di Tahun Anggaran 2024.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah kabupaten/kota	$= (\sum RIns / \sum$	$= (3/4) * 100\%$	$-\sum RIns =$ Jumlah Realisasi Indeks Ketahanan Diri

dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi"	TIns)*100%	=75%	-∑ TIns = Jumlah Target Indeks Ketahanan Diri
--	------------	------	---

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 secara jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi", BNN Provinsi Riau gagal mempertahankan prestasi tahun sebelumnya pada capaian pada tahun 2023 yaitu 4 Kabupaten/Kota yang memiliki Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" turun menjadi 3 Kabupaten/Kota.



Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. advokasi dan asistensi harus terus dilakukan pada seluruh stakeholder dan komponen masyarakat untuk mewujudkan komitmen dan berperan aktif dalam percepatan upaya P4GN;
2. menjalin kerja sama yang baik lagi dengan semua komponen baik itu pemerintah, swasta, masyarakat, dan lingkungan pendidikan dalam upaya meningkatkan ketahanan diri remaja dari penyalahgunaan narkoba;

3. koordinasi dan komunikasi yang perlu ditingkatkan lagi serta lebih banyak berpartisipasi dalam rangka bekerja sama pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan instansi-instansi terkait.

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika</b>
-------------------------	--

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja utama yang diuraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	4 Kab/Kota	4 Kab / Kota	100%

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi adalah Jumlah Kabupaten / Kota yang dapat membentuk / mengadvokasi ketahanan pada lingkungan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di suatu kabupaten/kota

Metode pengukuran jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi dengan kriteria yaitu :

- a. Menghitung jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi;
- b. Kriteria indeks ketahanan keluarga berkategori “Tinggi” dengan melakukan perhitungan indeks ketahanan keluarga menggunakan aplikasi Dektera yaitu setiap BNNP dan BNN Kabupaten/Kota memilih Desa/Kelurahan Bersinar yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi program P4GN selama tahun 2024;
- c. Klasifikasi indeks rata-rata ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai berikut :

c.1 kategori sangat tinggi dengan nilai 88,31-100

c.2 kategori tinggi dengan nilai 76,61-88,30

c.3 kategori rendah dengan nilai 65,00-76,60

c.4 kategori sangat rendah dengan nilai 25,00-64,99

No	Satker	Target	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Kualifikasi
1	BNN Provinsi Riau	78	92,857	91,429	93,571	Sangat Tinggi
2	BNN Kota Pekanba ru	78	90,893	85,625	87,054	Sangat Tinggi
3	BNN Kabupat en Kuantan Singingi	78	86,964	93,304	94,286	Sangat Tinggi
4	BNN Kabupat en Pelalawa n	78	86,339	70,804	90,714	Sangat Tinggi
5	BNN Kota Dumai	78	90,982	76,696	90,179	Sangat Tinggi

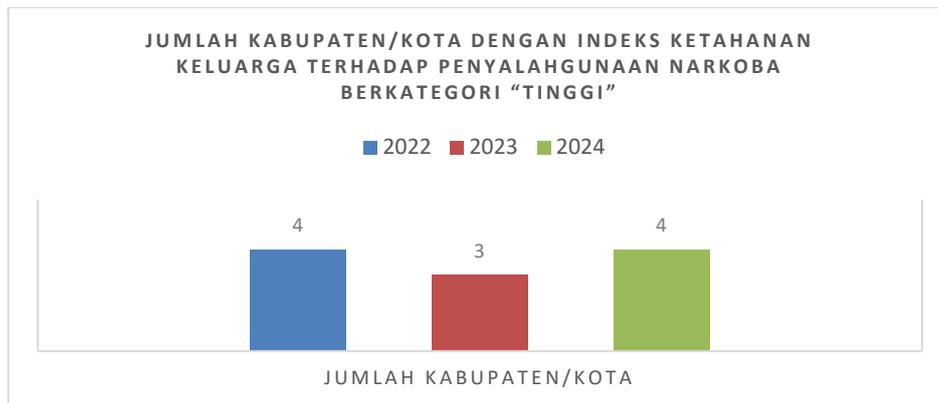
Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 4 kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi”, semua BNN Kab/Kota mencapai target minimal “tinggi” bahkan melebihi target, mencapai kualifikasi “Sangat Tinggi”

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga	$=(\sum RIns / \sum TIns) * 100\%$	$=(4/4) * 100\% = 100\%$	- $\sum RIns$ = Jumlah Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga - $\sum TIns$ = Jumlah Target

	Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi"			Indeks Ketahanan Keluarga
--	--	--	--	---------------------------

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 secara jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi", BNN Provinsi Riau mengalami kenaikan untuk capaian pada tahun 2024 yaitu dari 3 Kab/Kota menjadi 4 Kab/Kota.



Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja adalah :

1. Selektif dalam pemilihan keluarga yang menjadi target intervensi membutuhkan waktu dikarenakan sebagai penunjang keberhasilan program;
2. Penjelasan dari pelaksana fungsi pencegahan yang berhasil menjelaskan dengan cermat tata cara pengisian link kuisioner sehingga dipahami dengan baik oleh peserta;
3. Adapun kendala untuk pelaksanaan kegiatan di level BNN Provinsi Riau, Pelaksanaan Intervensi Ketahanan Keluarga di lokasi desa Bersinar yang berada di luar kota tidak didukung oleh anggaran yang memadai sehingga perlu bersinergi dengan pemerintah daerah

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. Semakin meningkatkan sinergi program dengan instansi /lembaga/organisasi terkait;

2. Dengan Adanya Inpres 2 tahun 2020 diharapkan setiap stakeholder mampu membuat program berbasis anti Narkoba diwilayahnya masing-masing.
3. Pelaksana fungsi menyesuaikan materi yang diberikan kepada peserta semaksimal mungkin, kreatifitas dari pelaksana fungsi baik di BNNP maupun di BNNK merupakan kunci dari keberhasilan dan tersampainya program dari kegiatan yang diberikan kepada peserta.

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Terselenggaranya penguatan kapasitas pada instansi dan lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba</b>
-------------------------	--

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	4 Kab / Kota	4 Kab / Kota	100%

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi adalah jumlah kabupaten/kota sesuai dengan 5 indikator berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba yang meliputi adanya : yaitu Aspek Manusia; Aspek Metode; Aspek Anggaran; Aspek Sistem; dan Aspek Sarpras.

Metode pengukuran jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi dengan kriteria yaitu :

- a. Menghitung jumlah kabupaten/kota yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba dengan kriteria kabupaten/kota tersebut sudah bergerak sesuai dengan 5 indikator yang telah ditetapkan oleh BNN RI yaitu Aspek Manusia, Aspek Metode, Aspek Anggaran, Aspek Sistem, dan Aspek Sarpras. (penghitungan melalui kuesioner penilaian IKP yang dibagikan ke masing2 kabupaten/kota);
- b. Dari hasil penghitungan kuesioner penilaian IKP yang telah dibagikan ke masing-masing kabupaten/kota didapatkan hasil sebagai berikut :

- b.1 IKP 1,00 – 1,75 : Tidak Mandiri
  - b.2 IKP 1,76 – 2,50 : Kurang Mandiri
  - b.3 IKP 2,51 – 3,25 : Mandiri
  - b.4 IKP 3,26 – 4,00 : Sangat Mandiri
- c. kabupaten/kota yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba termonitor oleh BNN atas laporan BNN di kewilayahan.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 4 kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi dapat terealisasi sebanyak 4 kabupaten/kota atau sebesar 100%.

No	Satker	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Kualifikasi
		2024	2022	2023	2024	
1	BNNP	3,68	3,67	3,68	3,68	Sangat Mandiri
2	BNNK PKU	3,85	3,47	3,85	3,85	Sangat Mandiri
3	BNNK Kuansing	3,75	3,68	3,75	3,86	Sangat Mandiri
4	BNNK Pelalawan	3,46	3,80	3,46	3,71	Sangat Mandiri
5	BNNK Dumai	3,89	3,71	3,89	3,89	Sangat Mandiri

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. semakin tumbuhnya kepedulian, kesadaran masyarakat, dan memandang bahwa permasalahan Narkoba menjadi persoalan bersama yang harus segera diatasi;
2. partisipasi aktif dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal yang mendukung program P4GN.

Hal hal yang perlu diperhatikan sebagai penghambat dari pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya anggaran dari instansi Penggiat P4GN;
2. Keberlanjutan kegiatan P4GN di tahun selanjutnya secara mandiri masih belum maksimal karena tidak adanya dukungan penuh dari Instansi Pelaksana untuk kegiatan tahun depan;

3. Stakeholder masih kesulitan dalam penganggaran test urine secara mandiri

Formula yang digunakan untuk meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN pada indikator kinerja kegiatan “jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi	$=(\sum RIns / \sum TIns) * 100\%$	$=(4/4) * 100\%$ $=100\%$	- $\sum RIns$ = Jumlah Realisasi kab/kota yang mandiri - $\sum TIns$ = Jumlah Target kab/kota yang mandiri

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 secara jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi tidak mengalami penurunan maupun peningkatan capaian pada tahun 2024 yaitu tetap 4 kabupaten/kota.



Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Belum semua BNN Kab/Kota menyentuh Kabupaten yang belum memiliki satker BNN Kab/Kota di wilayahnya namun masuk ke Rayonisasi BNN Kab/Kota tersebut karena keterbatasan anggaran;
2. Adanya kebijakan Automatic Adjustment dan pemotongan perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2024;

3. kendala yang terkadang ditemui seperti menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan antara pimpinan suatu instansi dengan pihak BNNP maupun BNN Kabupaten/ Kota sebagai pihak penyelenggara.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan dan ketrampilan penanganan penyalahguna narkoba di berbagai instansi/ lingkungan;
2. akan dilakukan Koordinasi/Komunikasi dan kerjasama yang lebih intensif bagi lingkungan dalam melaksanakan kegiatan P4GN;
3. terus melakukan sinergi dengan instansi/lembaga/organisasi terkait.
4. Untuk BNN Provinsi maupun BNN Kab/Kota agar dapat mengusulkan dukungan Hibah untuk pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat di Kabupaten/Kota yang belum memiliki satker vertical BNN Kab/Kota.

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Meningkatnya upaya pemulihan Kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan</b>
-------------------------	---

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Kawasan Rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari Bahaya Menjadi Waspada	1	1	100%
2	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang di intervensi	2,00	2,51	125,5%

Definisi operasional dari nilai keterpulihan kawasan rawan (IKKR) yang diintervensi adalah suatu alat ukur untuk mengukur sejauhmana intervensi program berhasil, berlanjut dan dirasakan masyarakat, dengan beberapa item pengukuran. Dalam konsep nilai keterpulihan kawasan rawan ini yang diukur, antara lain: (1)pelaksanaan program, (2) pelaksana program, (3) keberlanjutan program, (4) sinergi instansi pemerintah, (5) kemitraan duniausaha, (6) pelibatan

organisasi sosial masyarakat (orsosmas), dan (7) hasil program yang dirasakan masyarakat. Pengukuran terhadap status keterpulihan ini di laksanakan dengan pengukuran IKKR (Indeks keterpulihan Kawasan rawan) dengan kualifikasi sebagai berikut:

- A. IKKR 1,00 – 1,75 : Kategori A : BAHAYA
- B. IKKR 1,76 – 2,50 : Kategori B : WASPADA
- C. IKKR 2,51 – 3,25 : Kategori C : SIAGA
- D. IKKR 3,26 – 4,00 : Kategori D: AMAN

Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Alternatif di kawasan rawan Perkotaan hanya dilakukan oleh BNN Provinsi Riau, dengan melaksanakan Pemberdayaan di kawasan pesisir sesuai dengan strategi pengembangan kawasan pesisir yang digaungkan oleh BNN RI.

Tempat	Target IKKR	Realisasi IKKR	Kualifikasi	Ket
Kel. Bagan Hulu, Kec. Bangko. Kab. Rokan Hilir	2,00 (WASPADA)	2.51 (WASPADA)	Berhasil menurunkan dari Bahaya ke Waspada	Pelatihan Life Skill Pengolahan Hasil Laut kepada 15 Orang Warga

BNN Provinsi Riau dalam DIPA T.A 2024 menganggarkan pemberdayaan terhadap 15 (lima belas) orang warga di Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau melalui pelatihan life skill pengolahan hasil laut. Adapun hasil pengukuran IKKR yang di laksanakan kepada masyarakat adalah **2,51** dari target **2,00** (125,5%), sedangkan status nya berhasil diturunkan dari BAHAYA menjadi WASPADA atau turun 1 tingkat.

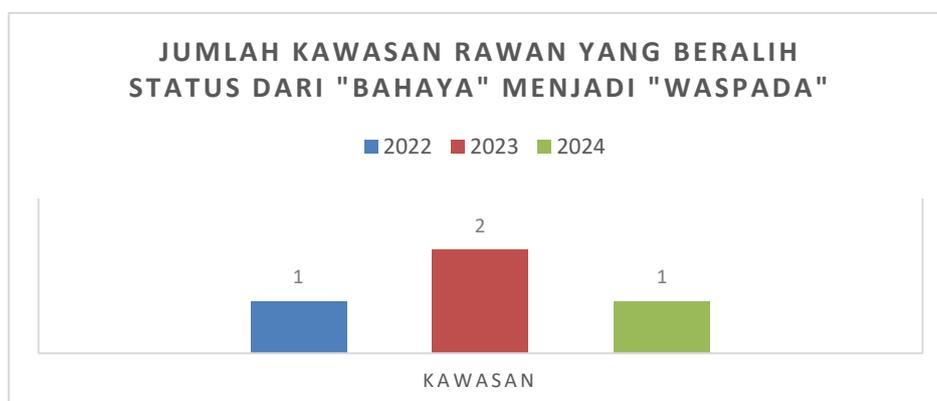
Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah adanya dukungan dari unsur perangkat lingkungan, dinas perindustrian, maupun masyarakat sendiri yang telah jenuh dan bosan dengan image negatif mengenai kawasan atau lingkungannya yang dicap sebagai kawasan/wilayah rawan narkoba. BNN Provinsi Riau juga berhasil mendapatkan dukungan dana hibah dari Pemerintah

Provinsi Riau dalam mendukung pelaksanaan Pemberdayaan Alternatif di wilayah Provinsi Riau.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan pada indikator kinerja kegiatan "jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada", adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah Kawasan Rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari Bahaya Menjadi Waspada	$=(\sum RKW / \sum TKW) * 100\%$	$=(1/1) * 100\% = 100\%$	- $\sum$ RKW = Jumlah Realisasi Jumlah Wilayah yang beralih status - $\sum$ TKW = Jumlah Realisasi Jumlah Wilayah yang beralih status
2	nilai keterpulihan kawasan rawan (IKKR) yang diintervensi	$=(\sum RKW / \sum TKW) * 100\%$	$=(2,51/2.00) * 100\% = 125,5\%$	- $\sum$ RKW = Jumlah Realisasi Nilai Keterpulihan - $\sum$ TKW = Jumlah Target Nilai Keterpulihan

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 secara jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" mengalami penurunan maupun peningkatan capaian pada tahun 2024 yaitu dari 2 kawasan menjadi 1 kawasan. Hal ini disebabkan adanya hibah dari APBD Provinsi Riau pada tahun akhir tahun 2022 yang kinerjanya diklaim di tahun 2023 sehingga bisa dilaksanakan kegiatan tambahan diluar anggaran DIPA.



Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah beberapa instansi/ lingkungan masih memandang program pemberdayaan anti narkoba bukan sebagai program prioritas yang harus dilaksanakan. Kemudian adanya

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. Memperkuat sinergi program dengan instansi/lembaga/organisasi terkait;
2. Dengan Adanya Inpres 2 tahun 2020 diharapkan setiap stakeholder mampu membuat program berbasis anti Narkoba diwilayahnya masing-masing;
3. Adanya pengukuran IKRN (Indeks Kawasan Rawan Narkotika) yang dilaksanakan pada akhir tahun 2024, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan alternatif kedepannya menyesuaikan dengan data terbaru kerawanan narkotika yang sudah dipetakan melalui IKRN.

**Sasaran** : Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	90,32%	132,8%

Definisi operasional dari penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah penyalahguna dan/atau pecandu narkotika memiliki persepsi individu terhadap kehidupan yang dijalannya sesuai dengan budaya dan nilai-nilai tempat individu tersebut tinggal serta membandingkan kehidupannya dengan harapan, standard an tujuan yang telah ditetapkan oleh individu. Pengukuran kualitas hidup merupakan salah satu evaluasi perkembangan klien yang dinilai saat mengikuti rehabilitasi. Dengan adanya peningkatan kualitas hidup, maka diharapkan klien akan memiliki capital pemulihan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang sehat, produktif, dan bermakna

Metode pengukuran persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Klien mengisi sendiri form WHOQoL-BREF yang sudah disediakan petugas;

2. Dilakukan skoring terhadap jawaban klien;
3. Evaluasi hasil WHOQoL-BREF klien;
4. Pencatatan dan pendokumentasian hasil WHOQoL-BREF.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 68% persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dapat terealisasi sebanyak 90,32% atau sebesar 132,8%. Adapun hasil dari masing-masing satker adalah sebagai berikut:

No	Satker	Target	Realisasi	Realisasi	Ket
		2024	2023	2024	
1	BNNP Riau	68%	69,8%	90,32%	
2	BNNK PKU	68%	75%	95,00%	
3	BNNK Kuansing	68%	97,32%	94,32%	
4	BNNK Pelalawan	68%	92,86%	80,92%	
5	BNNK Dumai	68%	82,73%	85,53%	

BNN Provinsi Riau berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dari Deputi Bidang Rehabilitasi pada awal tahun anggaran 2024, dari 4 satker BNN Kab/Kota, seluruh BNN Kab/Kota sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pada Penetapan Kinerja 2024.

<b>Sasaran Kegiatan</b>	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi
-------------------------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja utama yang diuraikan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Org	10 Org	100%

Definisi operasional dari petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

Metode pengukuran jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

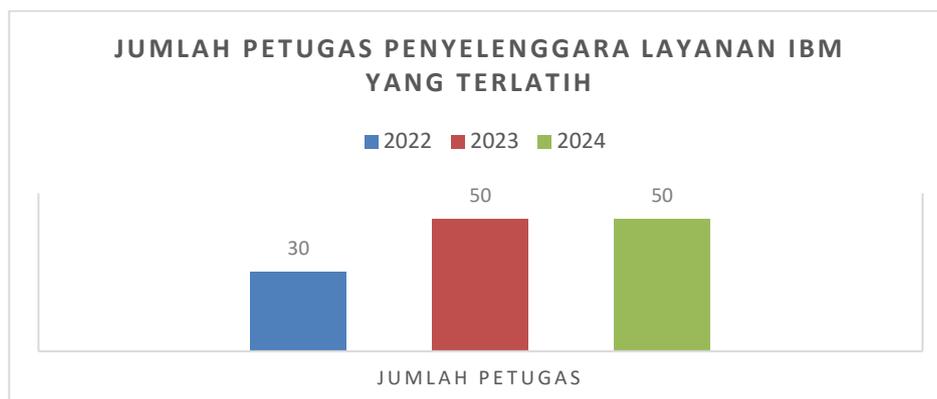
Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 10 orang jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dapat terealisasi sebanyak 10 Orang atau sebesar 100%. BNN Provinsi Riau berhasil membentuk 2 (dua) unit IBM dari target awal sebesar 2 (dua) unit IBM dan melatih 10 (sepuluh) Agen Pemulihan dari target 10 (sepuluh) orang. Adapun capaian kinerja Unit IBM yang berhasil di bentuk oleh BNN Provinsi Riau dan jajaran adalah sebagai berikut:

No	Satker	Target	Realisasi	%
1	BNNP	10	10	Sesuai Ekspektasi
2	BNNK PKU	10	10	Sesuai Ekspektasi
3	BNNK Kuansing	10	10	Sesuai Ekspektasi
4	BNNK Pelalawan	10	10	Sesuai Ekspektasi
5	BNNK Dumai	10	10	Sesuai Ekspektasi
	<b>JUMLAH</b>	<b>50 Org</b>	<b>50 Org</b>	Sesuai Ekspektasi

Formula yang digunakan untuk mengukur Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	$=(\sum \text{RIP} / \sum \text{TIP}) * 100\%$	$=50/50) * 100\%$ $=100\%$	- $\sum$ RIP = Jumlah Realisasi petugas - $\sum$ TIP = Jumlah Target petugas

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 secara jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih, tidak bisa dibandingkan dengan target kinerja karena pada tahun 2024, target kinerja yang dihitung hanya agen pemulihan yang di bentuk oleh satker BNNP Riau, sedangkan di tahun tahun sebelumnya hasil kinerja yang dihitung adalah seluruh petugas IBM yang dibentuk oleh BNNP Riau dan seluruh BNNK Jajaran. Jika capaian BNNP dan seluruh BNNK 2024 dibandingkan dengan capaian 2023, capaian jumlah petugas penyelenggara IBM yang terlatih sama capaian nya dengan capaian tahun sebelumnya.



Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya keraguan dari masyarakat sekita di Desa Bersinar untuk mengikuti program IBM yang dilaksanakan oleh Agen Pemulihan yang dibentuk;
2. Agen Pemulihan yang di bentuk belum terlalu terampil dalam melaksanakan program pemulihan yang dilaksanakan di IBM nya.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah meningkatkan koordinasi dengan Unit IBM pada Desa Bersinar yang ditunjuk sebagai pilot project agar kegiatan terlaksana dengan baik

<b>Sasaran Kegiatan</b>	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika
-------------------------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	100%

Definisi operasional dari lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi adalah lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan.

Metode pengukuran jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran.

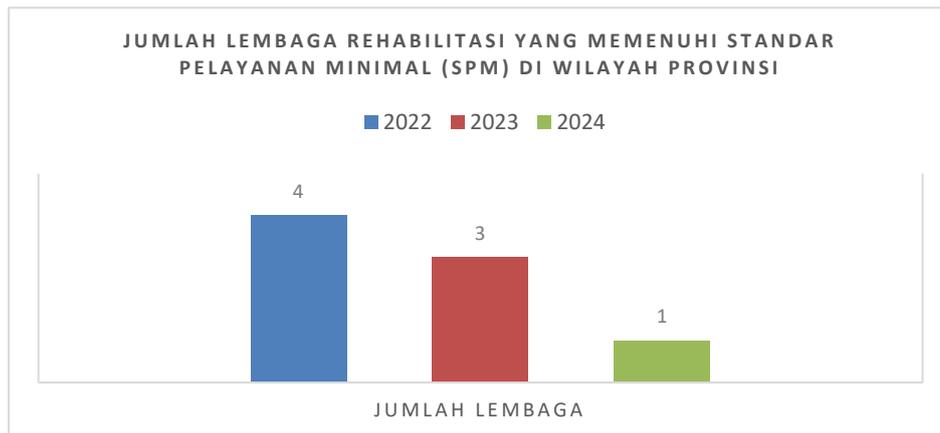
Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 1 lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi dapat terealisasi sebesar 1 lembaga atau sebesar 100%.

No	Nama Instansi	Kualifikasi	Ket
1	Yayasan Rumah Solid	Reguler	Nilai 80,77

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika pada indikator kinerja kegiatan “Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	$= \left( \frac{\sum RN}{\sum TN} \right) * 100\%$	$= (1/1) * 100\% = 100\%$	- $\sum RN$ = Jumlah Realisasi Lembaga Rehabilitasi SPM - $\sum TN$ = Jumlah Target Lembaga Rehabilitasi SPM

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 secara jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi, mengalami penurunan capaian pada tahun 2024 yaitu dari 3 lembaga pada tahun 2023 menjadi 1 lembaga pada tahun 2024. Namun, jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, BNN Provinsi Riau berhasil memenuhi target kinerja.



No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	10 Unit	10 Unit	100

Definisi operasional dari unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya.

Metode pengukuran jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 10 unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi dapat terealisasi sebesar 10 unit IBM atau sebesar 100%.

No	Satker	Target	Realisasi	%
1	BNNP	2	2	Sesuai Ekspektasi
2	BNNK PKU	2	2	Sesuai Ekspektasi
3	BNNK Kuansing	2	2	Sesuai Ekspektasi
4	BNNK Pelalawan	2	2	Sesuai Ekspektasi
5	BNNK Dumai	2	2	Sesuai Ekspektasi
	JUMLAH	10 Lembaga	10 Lembaga	Sesuai Ekspektasi

Kedepannya diharapkan setiap BNN Kab/Kota dapat mengoptimalkan anggaran yang ada untuk membentuk IBM di seluruh Desa Bersinar yang dibentuk. Optimalisasi anggaran yang ada dan koordinasi yang baik dengan stakeholder di Desa Bersinar merupakan faktor penting BNNP Riau dapat memenuhi target yang diberikan bahkan bisa melebihi target awal pembentukan IBM, diharapkan di tahun berikutnya optimalisasi anggaran untuk dapat melebihi target yang ditentukan bisa dilaksanakan, tentu saja dengan tidak mengurangi kualitas dari kegiatan dan optimalisasi yang dilaksanakan sesuai dengan Standar aktifitas maupun kegiatan yang berlaku.

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba pada indikator kinerja kegiatan “jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi”, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
2.	jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	$=(\sum RN / \sum TN) * 100\%$	$=(10/10) * 100\%$ $=100\%$	- $\sum$ RN = Jumlah Realisasi penyelenggara layanan rehabilitasi IBM - $\sum$ TN = Jumlah Target penyelenggara layanan rehabilitasi IBM

<b>Sasaran Kegiatan</b>	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi
-------------------------	---

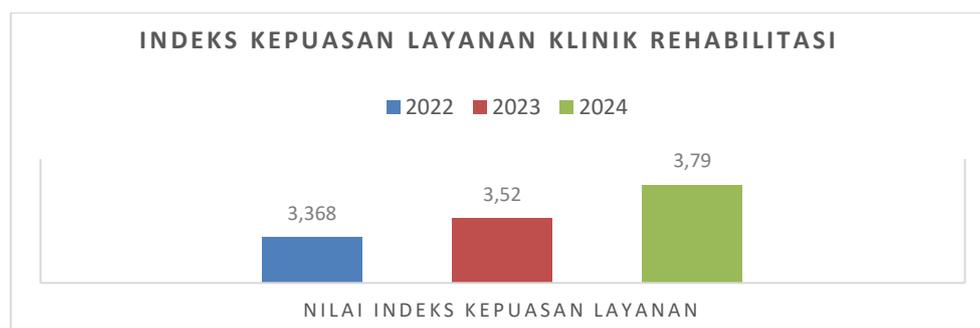
Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi2024	%
1.	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Riau	3.42	3,79	110,8%

Definisi operasional dari indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

Metode pengukuran indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Riau dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada Keputusan MenPANRB Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 3.42 untuk nilai indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Riau dapat terealisasi sebesar 3.79 atau sebesar 110,8%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, dimana BNNP Riau mendapatkan nilai 3,52 disimpulkan bahwa BNN Provinsi Riau selalu berusaha untuk memperbaiki kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat setiap tahunnya



Selain Klinik Pratama BNN Provinsi Riau, Fungsi Rehabilitasi juga memberikan asistensi dan pembinaan kepada Klinik Pratama jajaran BNN Kab/Kota, dengan hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No	Satker	Target	Realisasi	Ket
1	Klinik Pratama BNN Kota Pekanbaru	3,42	3,79	Di Atas Ekspektasi
2	Klinik Pratama BNN Kab. Kuantan Singingi	3,42	3,58	Di Atas Ekspektasi
3	BNN Kab. Pelalawan	3,06	3,77	Di Atas Ekspektasi
4	BNN Kota Dumai	3,42	3,66	Di Atas Ekspektasi

Dari 4 (empat) Klinik Pratama milik BNN Kab/Kota yang di laksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Layanan, seluruh BNN Kab/Kota mencapai target Indeks Kepuasan Layanan Klinik yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja T.A 2024.

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya</b>
-------------------------	--

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	12 Berkas P21	38 Berkas P21	145,8%

Definisi dari Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 adalah Jumlah kasus tindak pidana narkotika yang terungkap dan terselesaikan. Pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan ini adalah menghitung jumlah berkas kasus tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap dan diselesaikan.

Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 di Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

No	Satker	Target	Berkas P21
1	BNNP Riau	12 Berkas	38 Berkas

Dari Nilai total Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 (diselesaikan) oleh BNN Provinsi Riau dari target berkas sebesar 12 Berkas, tercapai sebanyak 38 Berkas yang P21. Pada tahun 2024, sesuai arahan dan strategi dari Kepala BNN RI di awal tahun, seluruh anggaran dan target untuk pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di BNN Kab/Kota ditarik ke BNN Provinsi Riau sehingga capaian dari BNN Kab/Kota seluruhnya di alihkan ke BNN Provinsi.

IKK Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 dibandingkan dengan pencapaian 5 (lima) tahun sebelumnya (tahun 2020-2024) adalah sebagai berikut :

No	Satker	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Ket
1	BNN Provinsi Riau	38	18	27	20	38	
2	BNN Kota Pekanbaru	6	5	4	7	0	
3	BNN Kab. Kuantan Singingi	0	0	2	0	0	
4	BNN Kab. Pelalawan	4	4	3	4	0	
5	BNN Kota Dumai	6	6	4	4	0	
	<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	

Dari data di atas, dapat disimpulkan selama tahun 2020-2024, kinerja Bidang Pemberantasan BNNP Riau dan jajaran selalu mencapai target dari tahun

ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan Overprestasi yang didapat dari segi pengungkapan dan penanganan kasus yang di laksanakan oleh Bidang pemberantasan di BNNP Riau.

Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian target dari Bidang Pemberantasan BNN Provinsi Riau dan jajaran BNN Kab/ Kota adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang baik dengan instansi terkait (Polda Riau dan Polres Jajaran, Kejaksaan Tinggi dan jajaran Kejaksaan Negeri, TNI , Bea Cukai dll)
2. Kinerja yang baik dari para anggota bidang pemberantasan baik di lingkungan BNNP maupun BNNK.
3. Komitmen yang baik dari pimpinan satuan kerja untuk sapu bersih peredaran Gelap Narkotika di wilayah hukum provinsi Riau.

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Anggota Bidang Pemberantasan, mulai dari BNN Provinsi sampai ke BNN Kab/Kota sebagai unsur pendukung dari BNNP.
2. Pemberian Pendidikan dan Pelatihan Reserse dan Penyidikan bagi anggota Bidang Pemberantasan untuk peningkatan kompetensi bagi Penyidik BNN Provinsi Riau dan Jajaran BNN Kab/Kota.
3. Penambahan personil yang memiliki sertifikasi Penyidik baik PNS/Polri untuk BNN Kab/Kota terutama BNN Kab Kuantan Singingi.
4. Pemberian Pendidikan Analis Intelijen dan Penggunaan IT bagi anggota Bidang Pemberantasan di BNN Provinsi Riau.
5. Peningkatan peralatan dan Sarana Prasarana Intelijen dan Persenjataan.
6. Lebih meningkatkan koordinasi dengan Instansi Penegakan Hukum yang lain seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika</b>
-------------------------	---

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100%
2	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba	100	100	100%

Tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan adalah kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan meliputi: tidak adanya tahanan yang kabur, perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas. Pengukurannya dengan mendata kejadian tahanan yang kabur, kejadian perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan kejadian hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas di lingkungan Rumah Tahanan BNN.

Adapun BNN Provinsi Riau dan BNN Kab / Kota jajaran belum ada yang memiliki ruang tahanan yang sesuai standar, sehingga tahanan hanya ditahan di BNNP/BNNK selama 6 (enam) hari pertama untuk penyidikan, selebihnya tahanan akan dititipkan di Rutan milik Kemenkumham ataupun Polda/Polres setempat.

Untuk penghitungan besaran indeks Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan dihitung dengan metode sebagai berikut:

Maka penghitungan indikator kinerja adalah:

a = jumlah tahanan yang kabur

b = jumlah tahanan yang menderita cedera serius atau kematian akibat perkelahian

c = jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas

Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan berada pada range 1 s.d. 10

Dengan Rumus:

$$\text{Indikator Kinerja} : \frac{\text{Jumlah Seluruh tahanan} - (a+b+c)}{\text{Jumlah Seluruh Tahanan}} \times 100\%$$

Maka:

$$\text{Indikator Kinerja} : \frac{39}{39} \times 100\% : 100\%$$

**Hasil Indikator Kinerja Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan adalah: 100%**

No	Satker	Laki-laki	Perempuan	Total
1	BNNP Riau	39 Org	-	39 Org

Adapun detil tahanan Kejahatan Narkotika yang berhasil di ungkap oleh BNN Provinsi Riau dan Jajaran pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Dari 39 (Tiga Puluh Sembilan) orang tahanan di atas, tidak ada yang kabur, cidera serius dan meninggal akibat kelalaian petugas.

Tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika, adalah kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar pada barang bukti narkotika dan non-narkotika. Pengukurannya dengan membandingkan data kondisi barang bukti narkotika dan non-narkotika pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahkan untuk tahap penuntutan (tahap II). Adapun Barang bukti yang berhasil di sita oleh BNN Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

No	Satker	Shabu	Ekstasi	Ganja	Lainnya
1	BNNP Riau	31.962,18 Gr	86.058 Btr	803,4 Gr	-

Jika jumlah dan jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan barang bukti dan BA pengeluaran, maka diperoleh nilai a = 1, jika terdapat perbedaan baik jumlah maupun jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan dan BA pengeluaran, maka a = 0.

Maka penghitungan indikator kinerja adalah:

a1 = untuk barang bukti 1

a2 = untuk barang bukti 2, dst..

Nilai tingkat keamanan barang bukti berada pada range 1 s.d. 100

Maka:

$$\text{Indikator Kinerja} : \frac{a_1+a_2+a_3+\dots+a_y}{y} \times 100\%$$

Dengan Y: Jumlah BA (Penitipan) dan Asumsi BA Penitipan = Jumlah Ba Keluaran

Maka:

$$\text{Indikator Kinerja} : \frac{39}{39} \times 100 \% : 100\%$$

**Hasil Indikator Kinerja Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika adalah: 100%**

Faktor pendukung dalam pencapaian target kinerja adalah kerjasama yang baik antara BNNP dan BNNK dengan instansi terkait (POLDA ,Kejaksanaan, Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi, Kanwil Kemenkumham/LAPAS/RUTAN )

Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama dengan Instansi terkait.
2. Berkoordinasi dengan BNN Pusat dan Dir Wastahti untuk penatalaksanaan Pengawasan Tahanan dan Barang bukti agar terlaksana sesuai standar yang berlaku.

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien</b>
-------------------------	---

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Riau	87	98,97	113,75%

Definisi operasional dari nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Riau adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas Penyerapan Anggaran, Konsistensi, Capaian RO (Output), Efisiensi dan Nilai Efisiensi.

Metode pengukuran nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Riau diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja T.A 2024 adalah sebesar 87 untuk nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Riau dan tercapai sebesar 98,97 atau sebesar 113,75%.

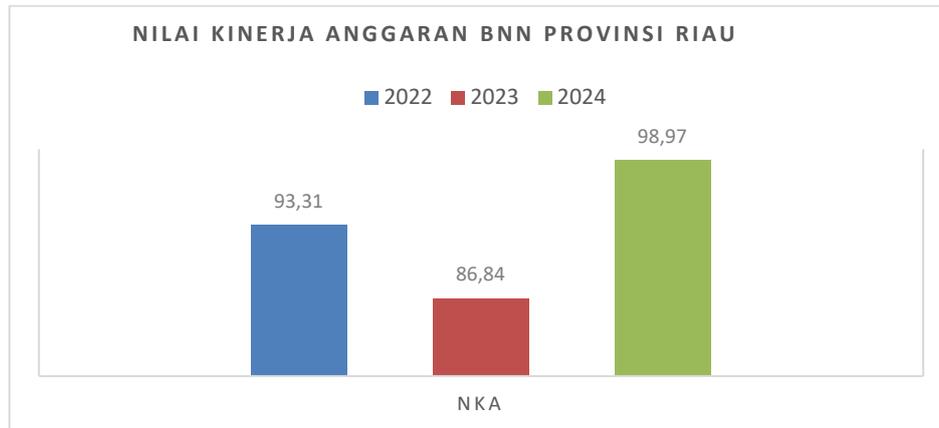
No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1		BADAN NARKOTIKA NASIONAL, PROVINSI RIAU	100,00	97,93	98,97

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja utama “Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Riau”, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Riau	$= (\sum \text{RNK} / \sum \text{TNK}) * 100\%$	$= (98,97/87) * 100\%$ $= 113,75\%$	- $\sum \text{RNK}$ = Jumlah Realisasi Nilai Kinerja Anggaran - $\sum \text{TNK}$ = Jumlah Target Nilai Kinerja Anggaran

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 secara Nilai Kinerja Anggaran BNN pada BNN Provinsi Riau, mengalami kenaikan capaian pada

tahun 2023 yaitu dari nilai 86,84 pada tahun 2023 menjadi 98,97 pada tahun 2024.



Nilai Kinerja Anggaran BNNP Riau mencapai dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNN, disebabkan adanya:

1. Pemblokiran anggaran yang berlangsung di penghujung tahun anggaran 2024 untuk perjalanan dinas, sehingga meningkatkan nilai efisiensi pada penghitungan Nilai Kinerja Anggaran (NKA);
2. Keberhasilan seluruh fungsi di BNNP Riau dalam memenuhi target output yang sudah ditetapkan pada rencana kerja tahun 2024, sehingga nilai capaian output pada NKA bisa maksimal;
3. Keberhasilan menyerap anggaran di atas 95 persen dengan output terealisasi maksimal, sehingga capaian penyerapan anggaran pada NKA mendapat nilai yang tinggi.

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan yaitu semakin meningkatkan kinerja capaian output dan anggaran di seluruh fungsi/bidang di satker BNNP Riau dan melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	4 BNN Kab/Kota	4 BNN Kab/Kota	100%

Definisi operasional dari nilai kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam

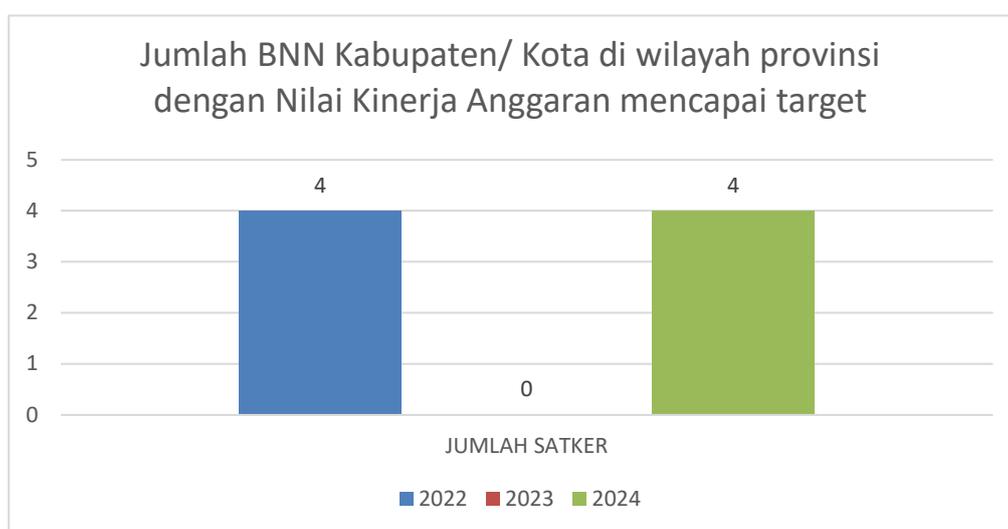
dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

Metode pengukuran Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Riau dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target diukur dengan cara mendata jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Riau yang memiliki Nilai Kinerja Anggaran (NKA) memenuhi target kinerja yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja T.A 2024.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 4 BNN Kab/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mencapai target, seluruh BNN Kab/ Kota mencapai target NKA yang diperjanjikan di Penetapan Kinerja T.A 2024.

No	Satker	Target	Realisasi 2024	Ket
1	BNNK PKU	87	99,27	Di Atas Ekspektasi
2	BNNK Kuansing	87	98,98	Di Atas Ekspektasi
3	BNNK Pelalawan	87	96,46	Di Atas Ekspektasi
4	BNNK Dumai	97	97,87	Di Atas Ekspektasi

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 secara Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target, mengalami peningkatan kinerja pada tahun 2024 yaitu dari tidak ada yang tercapai menjadi 4 BNN Kab/Kota yang mencapai nilai IKPA.



Faktor penyebab kegagalan pencapaian target kinerja adalah:

1. Pemblokiran anggaran yang berlangsung di penghujung tahun anggaran 2024 untuk perjalanan dinas, sehingga meningkatkan nilai efisiensi pada penghitungan Nilai Kinerja Anggaran (NKA);
2. Keberhasilan mayoritas fungsi di seluruh BNN Kab/Kota dalam memenuhi target output yang sudah ditetapkan pada rencana kerja tahun 2024, sehingga nilai capaian output pada NKA bisa maksimal;
3. Seluruh Satker BNN Kab/Kota berhasil menyerap anggaran di atas 95 persen dengan output terealisasi maksimal, sehingga capaian penyerapan anggaran pada NKA mendapat nilai yang tinggi.

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan untuk meningkatkan kinerja yaitu :

1. semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. menyesuaikan rencana kegiatan dengan rencana penyerapan anggaran supaya anggaran dapat terserap maksimal. semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Sosialisasi dan Perubahan Mindset dari pembina fungsi untuk tidak lagi mengedepankan realisasi anggaran, namun juga faktor efisiensi.

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur</b>
-------------------------	--

#### A. Capaian Kinerja IKPA

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Riau	97,56	97,96	100,4%

Definisi operasional dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Riau adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian

Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

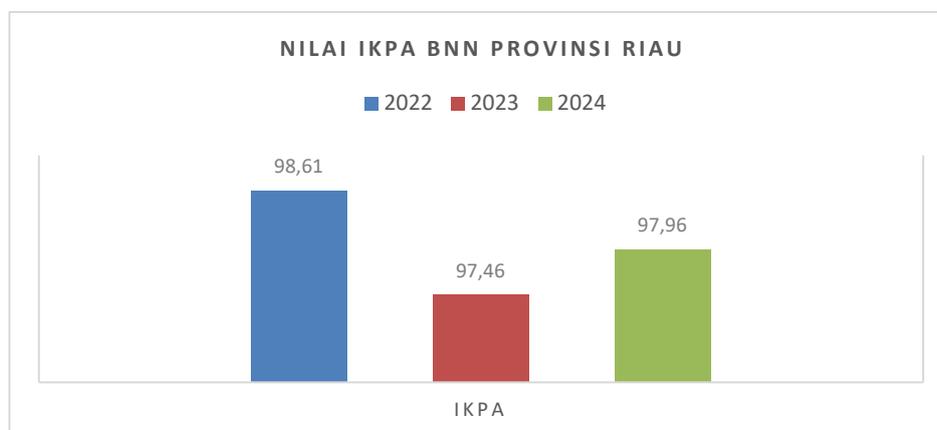
IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Metode pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Riau mengacu pada empat aspek pengukuran yaitu :

1. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang perencanaan dalam DIPA. Ada tiga indikator pada aspek ini yaitu : Revisi DIPA; Deviasi Halaman III DIPA; dan Pagu Minus.
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran. Terdapat empat indikator dalam aspek ini yakni : Data Kontrak; Pengelolaan UP dan TUP; LPJ Bendahara; dan Dispensasi SPM.
3. Efektivitas pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran. Empat indikator yang ada pada aspek ini yaitu terkait Penyerapan anggaran; Penyelesaian tagihan; Capaian output; dan Retur SP2D.
4. Efisiensi pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA. Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas menjadi dua indikator yang ada terkait aspek ini.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 97,56 untuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), BNN Provinsi Riau dapat mencapai realisasi IKPA sebesar 97,96 atau sebesar 100,4%.

Terdapat kenaikan kinerja bila dibandingkan dengan Nilai IKPA tahun 2023, dimana pada tahun anggaran tersebut BNNP Riau mendapat nilai IKPA sebesar 97,46 sedangkan pada tahun 2024 mendapatkan nilai 97,96.



Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja utama “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Riau”, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Riau	$= (\sum \text{RNK} / \sum \text{TNK}) * 100\%$	$= (97,96 / 97,56) * 100\%$ $= 100,4\%$	- $\sum \text{RNK}$ = Jumlah Realisasi Nilai IKPA - $\sum \text{TNK}$ = Jumlah Target Nilai IKPA

Faktor keberhasilan diperoleh karena BNN Provinsi Riau telah melaksanakan kepatuhan administrasi dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran dengan baik selama tahun 2024. Rekomendasi/ rencana aksi ke depan yaitu semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
2.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 BNN Kab/Kota	3 BNN Kab/Kota	75%

Definisi operasional dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku

BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Metode pengukuran Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Riau dengan Nilai IKPA mencapai target diukur dengan cara mendata jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Riau yang memiliki nilai IKPA sebesar 92.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 4 BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai 92 dapat direalisasikan oleh seluruh BNN Kab/Kota di Provinsi Riau.

No	Satker	Target	Realisasi	Ket
1	BNNK PKU	98,23	98,53	Di Atas Ekspektasi
2	BNNK Kuansing	98,96	97,95	Tidak mencapai target
3	BNNK Pelalawan	96,55	96,83	Di Atas Ekspektasi
4	BNNK Dumai	95,72	95,74	Di Atas Ekspektasi

Formula yang digunakan untuk mengukur meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja utama “Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target”, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Formula	Hasil Perhitungan	Keterangan
1.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	$= (\sum RTB / \sum TTB) * 100\%$	$= (3/4) * 100\%$ $= 75\%$	- $\sum RTB$ = Jumlah Realisasi BNN Kab/Kota mencapai target  - $\sum TTB$ = Jumlah Target BNN Kab/Kota mencapai target

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, secara Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target, mengalami penurunan capaian pada tahun 2024 yaitu dari 4 BNN Kab/Kota menjadi 3 BNN Kabupaten/ Kota yang mencapai target. Adapun BNN Kab/Kota yang gagal mencapai target adalah BNN Kab Kuantan Singingi.



Faktor kegagalan dari satker BNN Kabupaten Kuantan Singingi mencapai nilai IKPA sesuai target adalah :

1. Perencanaan Halaman III DIPA tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.
2. BNNK Kuantan Singingi sudah menerima KKP terbaru dari PT. BRI, Tbk (Persero), namun belum dipergunakan karena didapatkan pada akhir tahun anggaran.

Rekomendasi/ rencana aksi ke depan yaitu semakin meningkatkan kinerja yang berpedoman pada perencanaan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Realisasi Anggaran

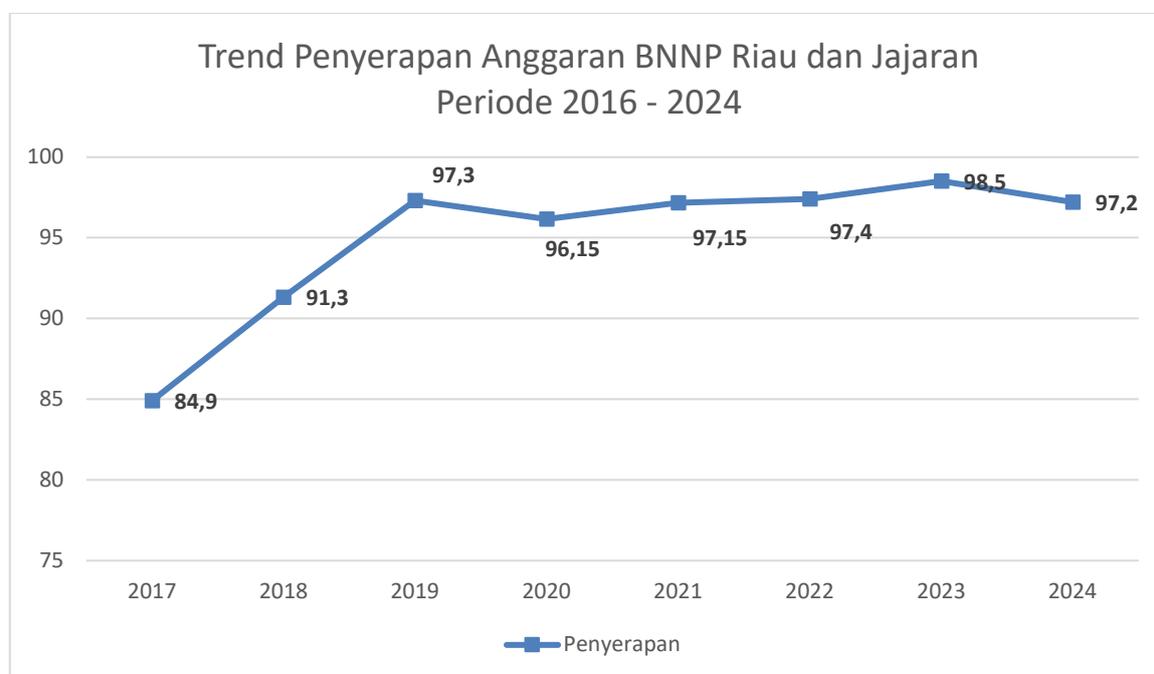
Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai realisasi anggaran BNNP dan seluruh BNNK/Kota di Provinsi Riau tahun 2024, yang dituangkan dalam tabel berikut ini :

SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp) (s.d 31 Des 2024)
<b>BNNP Riau</b>	10.555.286.000	10.229.603.696	97	325.682.304

<b>BNN Kota Pekanbaru</b>	1.704.084.000	1.695.676.300	99,51	8.407.700
<b>BNN Kab Kuantan Singingi</b>	1.794.567.000	1.775.561.628	98,94	19.005.372
<b>BNN Kab. Pelalawan</b>	1.726.997.000	1.660.681.276	96,16	66.315.724
<b>BNN Kota Dumai</b>	1.533.396.000	1.470.318.193	95,89	63.077.807
<b>TOTAL</b>	<b>17.314.330.000</b>	<b>16.831.841.093</b>	<b>97,2</b>	482.488.907

Tahun 2024 BNNP Riau dan jajaran BNN Kab/Kota mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 17.314.330.000,-** (Tujuh belas miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 16.831.841.093,-** (Enam belas miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh tiga rupiah) atau dengan persentase penyerapan sebesar **97,2%**.

Selama kurun waktu 2016 – 2024, tren penyerapan anggaran dari BNN Provinsi Riau dan jajaran BNN Kab Kota dapat dilihat di diagram di bawah ini:



Selama kurun waktu 2017 – 2019, trend penyerapan anggaran BNN Provinsi Riau dan seluruh BNN Kab / Kota mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2020 penyerapan sebesar 96,15 bisa di maklumi karena adanya pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia dan wilayah Provinsi Riau. Periode

anggaran 2021 – 2023 trend penyerapan anggaran naik dan sudah menyamai trend penyerapan sebelum pandemi Covid 19. Jika dibandingkan antara tahun 2023 dengan 2024, ada penurunan 1.3% untuk penyerapan anggaran, hal ini dikarenakan adanya kebijakan blokir anggaran perjalanan dinas di November 2024, sehingga BNNP Riau dan BNNK Jajaran terdapat anggaran perjalanan dinas yang diblokir sebesar Rp. 68.651.000 yang tidak bisa di serap sampai dengan akhir tahun anggaran.

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal</b>
-------------------------	---

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui indikator kinerja kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal	75	75,84	101.12 %

Definisi operasional dari Nilai Zona Integritas adalah suatu predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Metode pengukuran Nilai Zona Integritas pada BNN Provinsi Riau berdasarkan penilaian internal oleh Tim Inspektorat BNN RI mengacu pada beberapa tahapan yaitu :

1. Pencanaan ZI
  - a. Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh atau sebagian besar pegawai
  - b. Pernyataan komitmen telah siap membangun Zona Integritas
2. Pembangunan ZI
  - a. Menetapkan unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM
  - b. Membangun unit kerja menuju WBK/WBBM
3. Pengusulan
  - a. Penilaian Mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI)
  - b. TPI melaporkan kepada pimpinan instansi

- c. Pengusulan ke Kemen PAN RB
- 4. Reviu Tim Penilai Nasional (Kemenpan-RB, KPK, dan Ombudsman RI)
- 5. Penetapan WBK/WBBM
  - a. MenPANRB mengusulkan kepada Instansi Pemerintah agar unit kerja ditetapkan menjadi WBK
  - b. MenPANRB menetapkan unit kerja sebagai WBBM
- 6. Pembinaan dan Pengawasan
  - a. Pembinaan dilakukan Pimpinan Instansi K/L
  - b. Pengawasan dilakukan oleh Kementerian PANRB

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 75 untuk Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal dapat terealisasi sebesar 75,84 atau sebesar 101,12%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Riau Tahun 2024, merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNNP Riau sebagai pelayanan Publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNNP Riau telah berhasil merealisasikan berbagai kegiatan melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2020 - 2024 sesuai Renstra BNN Tahun 2020 - 2024. Capaian ini didukung melalui realisasi kinerja 4 (Empat) fungsi operasional di BNNP Riau, yaitu:

- 1) Fungsi Pencegahan
- 2) Fungsi Pemberdayaan Masyarakat
- 3) Fungsi Rehabilitasi
- 4) Bidang Pemberantasan dan Intelijen

Serta Bagian Umum sebagai fungsi pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas BNNP Riau dalam pelaksanaan P4GN.

Capaian Kinerja BNNP Riau beserta jajaran BNN Kab/Kota dibawahnya pada tahun 2024 menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, dan capaiannya. Kegiatan yang diprioritaskan yang tercantum pada 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNNP Riau.

Segala rencana perbaikan kedepan untuk tahun berikutnya diharapkan agar dapat dilaksanakan sehingga setiap tahunnya kinerja BNN Provinsi Riau semakin lebih baik. Partisipasi dari seluruh masyarakat, jajaran pemerintah, swasta, penegak hukum, dan seluruh komponen bangsa sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program P4GN di provinsi Riau sehingga cita-cita bersama dalam mewujudkan Riau Bebas Narkoba dan Indonesia Bersih dari Narkoba dapat terwujud.